

**EFEKTIVITAS DAN DAMPAK PENGELOLAAN ANGGARAN ALOKASI
DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN DI DESA
TURI KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI

Oleh:

EKO WAHYUDI

NIM: G71215016



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
SURABAYA
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Eko Wahyudi

Nim : G71215016

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Dalam
Meningkatkan Pemberdayaan di Desa Turi, Kecamatan
Panekan, Kabupaten Magetan

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Eko Wahyudi

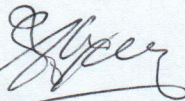
NIM. G71215016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Eko Wahyudi NIM. G71215016 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 5 Desember 2019

Pembimbing



~~Ana~~ Toni Roby Candra Yudha, M.SEI

NUP. 201603311

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Eko Wahyudi NIM. G71215016 ini telah dipertahankan di depan majelis Sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 16 Desember 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi

Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I,


Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI

NUP. 201613311

Penguji II,



Abdul Hakim, MEI

NIP. 197008042005011003

Penguji III,



Andhy Permadi, M.Kom

NIP.198110142014031002

Penguji IV,



Betty Silfia Ayu Utami, SE, M.SE

NIP. 198706102019032019

Surabaya, 16 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Ali Arifin, MM

NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Eko Wahyudi
NIM : G71215016
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ilmui Ekonomi
E-mail address : wahyudieko684@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

EFEKTIFITAS DAN PENGELOLAAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN DI DESA TURI KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Eko Wahyudi)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan**” ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana efektivitas dan dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan 2019.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan dalam penelitian ini yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa terdiri dari empat (4) tahap, yaitu penerimaan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian tahapan penerimaan Alokasi Dana Desa sudah efektif karena mencakup azas adil dan azas merata. Pada tahapan pelaksanaan atas program kerja berupa pemberdayaan masyarakat sudah terealisasi. Tahapan pertanggungjawaban berdasarkan hasil penelitian sudah efektif dengan adanya Surat Pertanggungjawaban dan sudah tersampaikan kepada inspektorat dengan tepat waktu serta sudah terlaksananya publikasi kepada masyarakat dalam bentuk papan pengumuman. Proses pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan teori dan peraturan daerah kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa.

Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Desa Turi agar selalu melibatkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan desa, karena dengan keterlibatan masyarakat maka akan menciptakan pemerintahan desa yang transparan. Serta selalu memperbaiki sistem pemerintahan yang baik dan jujur.

Kata Kunci : Efektifitas, Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identitas Dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	15
G. Definisi Operasioanal.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	31
A. Efektivitas.....	31
B. Alokasi Dana Desa.....	33
C. Pemberdayaan Masyarakat.....	46
BAB III DATA PENELITIAN.....	49
A. Gambaran Umum Desa Turi.....	49

PENDAHULUAN

Setiap negara berambisi besar untuk memiliki pembangunan nasional yang baik dan sejahtera. Dan saat ini pemerintah Indonesia terus meningkatkan pembangunan nasional baik itu dari segi fisik maupun non fisik dengan menyelaraskan laju pembangunan daerah pada pembangunan desa dan kota. Pembangunan Daerah memiliki pengaruh yang besar terhadap peningkatan mutu pembangunan nasional karena didalamnya terdapat upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menyeluruh secara langsung pada kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan.¹

¹ Suwondo, Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, “PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)” 1, no. 6 (2012): 1203–1212.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa yang mengatur keberadaan desa. Pada Undang-Undang tersebut telah disebutkan bahwasanya Undang-Undang tersebut akan mengatur keberadaan organisasi yang ada pada suatu pemerintahan desa, selain itu diharapkan desa mampu melakukan proses pembangunan desa pada suatu daerahnya masing-masing dengan mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan terpusatnya urusan pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten/kota yang diserahkan peraturannya kepada pemerintah desa.³

Berdasarkan pada UU No.16 Tahun 2014 yang mengenai pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatur dan mengawasi semua kepentingan masyarakat menurut asal-usul dan adat

³ Faizatul Karimah, Choirul Saleh, dan Ike Wanusmawatie, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)" 2, no. 4 (2005): 597-602.

Keuangan desa yang didapatkan dari Pendapatan Asli Desa seperti hasil usaha desa, swadaya dan partisipasi dimana keuangan Desa tersebut merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan desa yang berupa nominal/uang, yang terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pada urusan pemerintah desa diharuskan membuat APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) karena dengan melalui APBDes kebijakan desa yang telah diajabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya pada APBDes.

Dengan pemerintah desa membuat APBDes, maka kegiatan yang ada pada desa berupa pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam setahun akan berjalan karena sudah terancang anggarannya. Tanpa adanya APBDes, pemerintah desa akan kesulitan dalam melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun struktur APBDes itu terdiri dari atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan

[illegible]

desa. Kepala desa wajib lebih teliti lagi dalam pengambilan pendapatan desa yang telah menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.⁵

Pendapatan yang didapatkan oleh desa salah satunya yaitu berupa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah berupa Alokasi Dana Desa. Dimana Alokasi Dana Desa tersebut diberikan oleh Pemerintah Kabupaten pada setiap tahunnya. Pemberian besaran dana disesuaikan dengan kriteria pembagian dana meliputi luas wilayah, jumlah penduduk, potensi ekonomi dan jumlah unit komunitas yang ada di desa. Yang kemudian Alokasi Dana Desa ini menjadi pendukung dalam kegiatan otonomi desa supaya dapat maksimal dalam memberikan pelayanan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat pada tingkat desa.⁶

Pengalokasian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan menjadikan desa lebih maksimal lagi dalam meningkatkan pembangunan daerah. Proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilakukan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju kemajuan desa. Dimana Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki peran penting dalam keberhasilan otonomi desa. Adanya dari bantuan langsung yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan memiliki tujuan sebagai bantuan untuk mendorong pembiayaan dalam program pemerintah desa dan juga

⁵ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta : Erlangga, 2011). Hlm.91

⁶ Karimah, Saleh, dan Wanusmawatie, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan).” 2 No.4 (2005). 597-602

memanfaatkan Sumber Daya Manusia meliputi, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Terkait hal tersebut maka terjadi permasalahan yang menarik untuk dibahas mengenai proses penggunaan Alokasi Dana Desa di desa. Oleh karena itu, penelitian ini membahas Alokasi Dana Desa dengan melakukan penelitian yang mengamati proses pengelolaan Alokasi Dana Desa yang selama ini telah dilakukan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada dan memiliki pengaruh terhadap pembangunan daerah. Dimana Alokasi Dana Desa merupakan pendapatan desa yang diutamakan untuk menunjang pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Turi. Maka, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian: “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan di Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan”.

B. Identitas Dan Batasan Masalah

1. Identifikasi

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang masalah telah teridentifikasi beberapa permasalahan-permasalahan yang muncul tentang Alokasi Dana Desa antara lain:

- a. Apakah implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) sudah sesuai dengan prosedur yang ada.
- b. Apakah pemberdayaan masyarakat sudah terlaksana dengan baik.
- c. Bagaimana partisipasi masyarakat terhadap Alokasi Dana Desa (ADD).

Dilihat dari telah terealisasinya program Alokasi Dana Desa yang telah diberikan Pemerintah kota/kabupaten kepada pemerintah desa sebesar itu dan munculnya berbagai identifikasi atas permasalahan tentang program Alokasi Dana Desa. penelitian ini hanya dibatasi pada:

- a. Kontribusi dari program anggaran Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat desa
- b. Penggunaan program Alokasi Dana Desa yang dilihat dari segi penerimaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

[illegible]

1. Bagaimana efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.
2. Bagaimana dampak pengeloan Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Turi Kecamatan panekan Kabupaten Magetan.

Ada beberapa penelitian mengenai Pengalokasian Alokasi Dana Desa telah dilakukan seperti. Oleh Helen Florensi 2014, dalam penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri” dengan menggunakan penelitian metode kualitatif. Penelitian ini membahas mengenai adanya kebijakan ADD yang sistem pengelolaannya secara mandiri memberikan dampak positif bagi pemerintah desa maupun masyarakat dalam memberikan keleluasan dalam mengelola pemerintah desa, pembangunan serta sosial kemasyarakatan secara otonom. Selain itu ada sedikit kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih adanya warga yang belum mengetahui mengenai adanya ADD sehingga belum maksimal pemanfaatannya.

[illegible]

[illegible]

Chandra Kusuma Putra dan Ratih Nur Pratiwi. dalam penelitiannya yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini membahas Sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pembangunan fisik. Memang benar partisipasi masyarakat sudah baik tapi dalam proses penjangkaran aspirasi program kurang terarah karena pendidikan masyarakatnya yang rendah, selain itu kurangnya sosialisasi perangkat desa kepada masyarakat. Seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat dulu dan dinilai tidak sesuai dengan Perbup Malang Nomor 18 tahun 2016 mengenai Alokasi Dana Desa dan Faktor penghambatnya yaitu. rendahnya SDM perangkat desa maupun penduduk desa.

[illegible]

[illegible]

Evliani dalam penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Anggaran Dana Desa di Desa Wayheru Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini membahas tentang temuan-temuan dalam penelitian ini yaitu tingkat partisipasi masyarakat Desa Way Haru dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan yang tergolong baik dalam partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan dan evaluasi. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa pemerintah desa sangat komunikatif dengan masyarakat dalam melakukan regulasi penetapan ADD dan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan tepat waktu. Pada penyusunan ADD masyarakat desa sangat antusias karena masyarakat menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan.

[illegible]

Sholihatul Fitri dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kualitas Pembangunan Fisik dan Non Fisik Dalam prospektif Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik” penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini membahas pemnafaatan ADD Desa Madulmulyo yang digunakan untuk pembanguna fisik dan non fisik. Pengalokasian ADD di Desa Madumulyo sudah efektif dilihat dari terlaksananya pembanguna meliputi pembangunan irigasi pertanian, pembangunan saluran drainase, pembangunan gapura desa, pembangunan lapangan bola voli, perbaikan jalan poros desa dan pemugaran makam desa. Bentuk wujud nyata dari pembangunan non fisik berupa pengadaan taman posyandu untuk lansia dan balita, dan pengadaan insentif guru Taman Pendidikan Al-Qur'an.

[illegible]

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas. maka dapat dirancang tujuan penelitian sebagai berikut:

- ## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Turi diharapkan memberikan manfaat untuk beberapa pihak yang bersangkutan:

- ## 1. Manfaat Secara Umum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dari berbagai literatur ekonomi mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa dalam peranannya meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, masyarakat diharapkan lebih peka lagi terhadap program-program yang ada pada pemerintahan desa.

2. Manfaat Untuk Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk Pemerintah kabupaten Magetan yang dijadikan sebagai evaluasi mengenai proses realisasi anggaran Alokasi Dana Desa. Dan untuk Pemerintah Desa Turi agar lebih optimal lagi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan peraturan yang ada dan sesuai peruntukan dalam pelaksanaannya.

3. Manfaat Untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti selanjutnya mengenai bagaimana prosedur pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat.

G. Definisi Operasioanal

Adapun tujuan dari definisi konsep operasional yaitu untuk memberikan arahan kepada peneliti untuk melakukan penelitian. maka dari itu perlu adanya penyusunan definisi konsep yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. antara lain;

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran dari keadaan atau kemampuan dari suatu kerja yang telah dilaksanakan oleh manusia atau sebuah instansi dengan tujuan mendapatkan hasil yang memuaskan dan sesuai apa yang diharapkan.

2. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa yang didapatkan dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan besaran 10% yang berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Dimana dari seluruh kegiatan program pemerintah desa yang diPanekang dengan Alokasi Dana Desa kemudian akan di pertanggungjawabkan dan dilaporkan secara terbuka dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat desa.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kegiatan sosial masyarakat yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi diri sendiri, pemberdayaan ini terjadi apabila masyarakat ikut langsung berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Suatu pemberdayaan dikatakan berhasil apabila kelompok masyarakat menjadi agen pembangunan atau sebagai motor penggerak.

H. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan sebuah penelitian yang mampu menangkap suatu keadaan yang sebenarnya dari suatu objek yang akan diteliti. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Adapun alasan penetapan lokasi penelitian ini karena Desa Turi

b. Wawancara

c. Dokumen dan Arsip

¹⁰ Sulastrri, “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna.” Skripsi (2016). 31-48

6. Teknik Pengelolaan Data

Reduksi data lebih mengarah pada proses pemilihan, pengorganisasian, dan transformasi data mentah yang sudah ada dalam catatan lapangan yang sudah tertulis dari lapangan. Mereduksi data sama halnya dengan menyaring, merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan polanya. Kurang lebih reduksi data dilakukan setelah mengumpulkan data dengan langkah-langkah sebagai berikut, memilah-milahnya dalam satuan konsep kategori atau tema.

Hasil dari wawancara dengan Kepala desa, Sekretaris dan Bendahara Desa Turi Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, mengenai pengelolaan keuangan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat yang terdampak Alokasi Dana Desa, data yang tercatat dipilih terlebih dahulu dan selanjutnya dipisahkan berdasarkan kategori atau tema mengenai dampak Alokasi Dana Desa terhadap efektivitas penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Turi Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini. maka data-data tersebut diperoleh dari Kepala Desa. Sekretaris Desa dan Kepala Urusan keuangan Desa yang melaksanakan program kerja pada Pemerintah desa dengan memanfaatkan Alokasi Dana Desa serta tokoh masyarakat dan masyarakat Desa yang andil dan memakai fasilitas pada Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

¹³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Conny R. Semiawan, Edisi Revi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2014).

langsung. Serta diPanekang dengan data dokumentasi. sehingga hasil dari data triangulasi tersebut dapat memberikan kesimpulan mengenai keabsahan data penelitian. Apakah data yang diperoleh dari penelitian ini konsisten. tidak konsisten atau berlawanan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun sebuah penelitian, sistematika yang digunakan penulis meliputi sebagai berikut:

<p>BAB I (Pendahuluan)</p>	<p>Bab ini menjelaskan latar belakang masalah. identifikasi dan batasan masalah. rumusan masalah. kajian pustaka. tujuan penelitian. kegunaan hasil penelitian. definisi operasional. metode penelitian. dan sistematika pembahasan.</p>
<p>BAB II (Kerangka Teoritis)</p>	<p>Bab ini menjelaskan tentang teori Efektifitas. Pemberdayaan Masyarakat Desa. Alokasi Dana Desa. penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.</p>
<p>BAB III (Data Penelitian)</p>	<p>Bab ini menjelaskan deskripsi data yang berkenaan dengan variabel yang diteliti secara obyektif dalam arti tidak dicampur dengan opini penelitian. Deskripsi data penelitian dilakukan dengan jelas dan lengkap tentang penggunaan anggaran alokasi dana desa dalam memberdayakan masyarakat desa</p>
<p>BAB IV (Analisis Data)</p>	<p>Bab ini menjelaskan analisis terhadap data penelitian dengan metode kualitatif deskriptif untuk menjawab masalah penelitian. menginterpretasikan dan menggabungkan hasil penelitian itu ke dalam kumpulan pengetahuan yang sudah bagus. memodifikasi teori yang sudah ada atau menyusun sebuah teori baru.</p>

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Efektivitas

Menurut Schemerhon John R. Jr, Efektivitas merupakan suatu alat ukur dalam pencapaian semua sasaran yang akan digunakan. Dimana dalam pencapaian target tersebut menentukan besar output yang diukur dengan membandingkan pada output anggaran yang seharusnya dengan output realisasinya. Jika anggaran yang seharusnya itu lebih besar dari anggaran realisasinya maka itu disebut efektif. Efektivitas mempunyai keterkaitan yang erat dengan efisiensi yang dapat dilihat dari berbagai sudut dan dapat dinilai dengan berbagai cara.

Menurut Mardiasmo, efektivitas merupakan suatu ukuran atas berhasil tidaknya dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif, apabila suatu organisasi dapat mencapai tujuannya.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan atas tercapainya program-program kegiatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya.

g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, karena apabila tidak dilaksanakan dengan efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mampu mencapai tujuannya.

B. Alokasi Dana Desa

Salah satu pendapatan desa yang diterima oleh desa itu ada di APBDes yaitu berupa Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan ditransferkan melalui kepala urusan keuangan desa. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, maka kebutuhan desa akan terpenuhi dalam mengelola pembangunan desa dan pemerintahannya secara otonom. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Desa, dimana penyelenggaraan pada urusan Pemerintahan Desa didanai dari APBDes dan bantuan Pemerintah Desa.

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diperuntukkan untuk desa dari Kabupaten/Kota yang sudah dituangkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa). Dengan adanya pemberian Alokasi Dana Desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan desa dalam melaksanakan otonomi supaya desa dapat berkembang serta mampu meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan pada wilayah yang strategis. Adapun besaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa yaitu 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Pengalokasian Alokasi Dana Desa juga memperhatikan apa yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009, berikut rumus dalam penentuan besaran Alokasi Dana Desa:

- [illegible]

- Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwasanya Alokasi Dana Desa merupakan anggaran dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dengan pembagiannya secara proporsional untuk setiap desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 20017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa lebih mencakup pada keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan penganggaran, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

[illegible]

Alokasi Dana Desa merupakan program yang telah disediakan oleh pemerintah pusat dan program lanjutan dari dana bantuan desa semenjak tahun 1969 dalam bentuk instruksi pemerintah pembangunan desa. Dengan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, dengan demikian Alokasi Dana Desa kemudian dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Setelah terlaksananya otonomi daerah tersebut, maka selanjutnya pemerintah Kabupaten wajib memberikan kewenangan kepercayaan kepada pemerintahan desa untuk sebagai desa otonom dalam mengelola anggaran suatu kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun tujuan yang diharapkan dari pelimpahan kewenangan agar tercipta kemandirian masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai budaya adat yang ada di masyarakat yang dilandasi dengan kebijakan pemerintah.

Pemberian kepercayaan kewenangan kepada pemerintahan desa untuk menjadi desa otonom dalam mengelola anggaran pada suatu kegiatan yang tercermin pada kebijakan pemerintah daerah. Adapun kebijakan pemerintah daerah tersebut yaitu berupa Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan suatu kegiatan secara otonom. Pada dasarnya pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa dalam melaksanakan otonominya supaya dapat tumbuh dan berkembang dengan mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri.

Perencanaan merupakan suatu proses dalam menentukan hal-hal yang akan dicapai sesuai dengan tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang agar dapat mencapai hasil yang memuaskan. Jadi pada tahap perencanaan ini, Alokasi Dana Desa disusun oleh pemerintah desa dengan menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dengan tujuan mencapai hasil yang maksimal. Berdasarkan penjelasan mengenai konsep perencanaan, bahwa ada 5 aspek yang perlu diperhatikan dalam konsep perencanaan, antara lain:

- [illegible]

- Perencanaan pada keuangan desa berasal dari hasil kesepakatan dalam musyawarah desa yang menjadi dokumen terdiri dari RPJMD dan Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPD) dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan desa. Dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan seluruh lapisan masyarakat desa yang kemudian menghasilkan susunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Penetapan RPJMD paling lama tiga bulan terhitung semenjak kepala desa dilantik. RPJM tersebut berisikan mengenai visi misi kepala desa yang sudah terpilih, rencana pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan arah pada kebijakan perencanaan pembangunan desa.

Berikut mekanisme perencanaan dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa, antara lain:

- [illegible]

- Dimana dalam penyusunan rancangan APBDes harus disusun oleh pemerintah desa. Penyusunan rancangan APBDes dilakukan setelah adanya penetapan peraturan bupati/kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa. Penetapan peraturan bupati/kota wajib di sampaikan dan disosialisasikan kepada desa untuk mengetahui besaran Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa.

Dalam menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatannya kepala desa harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Pembagian Alokasi Dana Desa tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan daftar urutan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Kepala desa tidak diperbolehkan merubah daftar kegiatan yang sudah direncanakan dan telah dibiayai Alokasi Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam RKPD

[illegible]

- 1) Tunjangan kepala desa dan perangkat desa
- 2) Tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa
- 3) Biaya sekretariat desa
- 4) Biaya sekretariat Badan Permusyawaratan Desa
- 5) Biaya pemeliharaan sarana pemerintahan desa

- 1) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- 2) Pinjaman modal usaha masyarakat
- 3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- 4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- 5) Teknologi tepat guna
- 6) Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- 7) Pengembangan sosial budaya

[illegible]

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang sudah ditetapkan muncul sebelum adanya transaksi penerimaan dan pengeluaran keperluan desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Dengan adanya dukungan bukti yang lengkap dan sah maka semua penerimaan dan pengeluaran desa dapat dipertanggungjawabkan oleh desa. Jadi, setelah adanya pelaksanaan perencanaan maka langkah selanjutnya yaitu pengorganisasian mengenai pelaksanaan dari kegiatan tersebut agar semua berjalan sesuai dengan keinginan.

Pada proses realiasi APBDesa, yang memegang koordinator pada kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat adalah Kepala Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan harus lebih mengutamakan pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan sumber Daya Alam yang ada di desa serta memperdayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Disamping itu, APBDesa juga digunakan untuk kegiatan pembangunan antar desa maupun pembangunan kawasan perdesaan. Dimana pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan melalui pendekatan pembangunan partisipatif, inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan perdesaan dapat dilakukan dengan cara botton up dengan melalui pengusulan Kepala Desa kepada

Dalam halnya pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, bantuan pendamping secara berjenjang bisa didapatkan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Secara teknis, pendampingan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/Kota dan dapat dibantu pula oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa atau pihak ketiga yang dikoordinator oleh Camat di wilayah desa tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa pasal 11 ayat 1 disebutkan , bahwa pembangunan pada skala desa yang anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sedangkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, selain pada penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa atau Alokasi Dana Desa.

[illegible]

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan di muka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi¹⁴:

- ¹⁴ Sumadinigrat, pemberdayaan masyarakat. 2018

tingkat pendidikan yang bervariasi serta tingkat kesehatan yang dinilai cukup baik.

2. Visi dan Misi Pemerintah Desa Turi

a. Visi

Secara normatif visi desa Turi menjadi tanggung jawab Kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Desa melalui rangkaian panjang diskusi formal dan informal. Visi Desa Turi semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksanannya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2014 – 2019. Dengan ini Visi desa Turi dijadikan harapan dan doa semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada pada Desa dan masyarakat. Kenyataan yang dimaksud merupakan potensi, permasalahan maupun hambatan yang ada di Desa dan masyarakatnya yang ada pada saat ini maupun ke depan ada perubahan.

Maka dengan tersebut dirumuskan dan ditetapkan visi desa Turi,
Sebagai berikut;

"Membangun masyarakat Desa Turi yang beriman, berbudaya dan berdaya guna menuju kehidupan yang aman tentram, mandiri, sejahtera dan siap menyongsong globalisasi"¹⁶

Yang dimaksud dengan pernyataan visi diatas adalah mengandung nilai sebagai berikut:

¹⁶ *ibid*

Untuk mencapai visi Desa Turi seperti yang telah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Turi sebagai berikut;

1. Kerukunan dan gotong-royong antar masyarakat desa Turi adalah modal pembangunan Desa Turi
2. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi dan lainnya dalam suasana saling menghormati dan menghargai
4. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
5. Menata Pemerintahan Desa Turi yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
7. Pertanian yang maju tak lepas dari penerapan ilmu-ilmu pertanian modern.
8. Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur adalah kunci utama kesejahteraan

9. Pembangunan Desa Turi adalah Pembangunan Seutuhnya baik mental maupun spiritual.

10. Pembangunan yang mengedepankan sektor perekonomian dengan peningkatan hasil pertanian.¹⁷

3. Struktur Kelembagaan Pemerintahan Desa Turi

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara dari urusan pemerintahan desa yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dimana mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang telah diakui dan dihormati pada sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun lembaga Pemerintahan Desa dan Aparatur Desa Turi, yaitu:

- a. Kepala Desa
- b. Unsur staff yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Perencanaan dan Kepala Urusan Pemerintahan
- c. Unsur pelaksana teknis lapangan terdiri dari Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat.

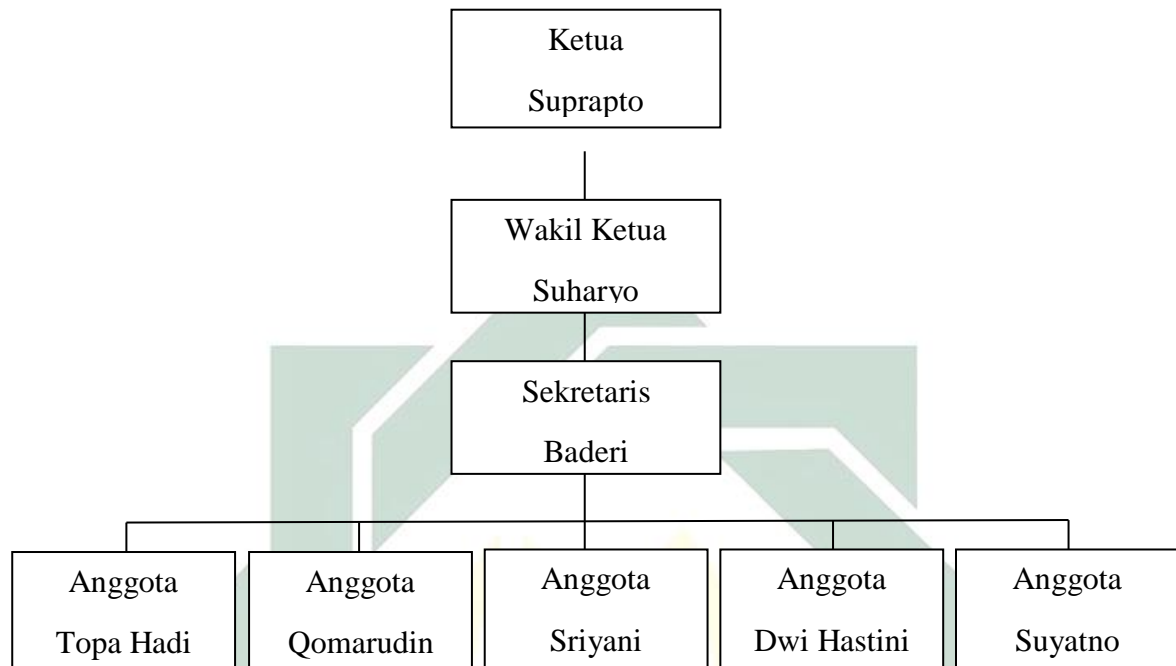
Desa Turi terdiri dari lima Dusun yang dikepalai oleh seorang Kepala Dusun. Hasil dari identifikasi kelembagaan terdapat 9 lembaga sosial kemasyarakatan dan pemerintahan yang ada di Desa Turi lembaga

¹⁷ Ibid.

Pada bagan struktur kelembagaan pemerintah Desa Turi yang memiliki wewenang tertinggi di Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan yang berada dibawahnya terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kaur Tata Usaha dan Umum, kepala Urusan Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, Kasi Pelayanan, Kamituwo, RT. Dimana Badan Permusyawaratan Desa memiliki wewenang dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Maka dari itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dua lembaga yaitu pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Tugas pemerintah desa yaitu menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Gambar 3.2
Struktur Badan Permusyawaratan Desa



Sumber : Data statistik Desa Turi 2019

Menurut alur bagan diatas, struktur Lembaga Permusyawaratan Masyarakat Desa terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan 5 anggota. Struktur LPMD di Desa Turi ini tergolong baik karena masing-masing jabatan dalam struktur kepengurusan sudah terpenuhi.

4. Kondisi Geografis Desa Turi

Secara administratif, Desa Turi terletak di wilayah Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan dengan posisi dibatasi wilayah desa-desa tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Simo, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rejomulyo, di sebelah timur berbatasan dengan

dijadikan tolak ukur dan pedoman dalam suatu perencanaan Alokasi Dana Desa.

Tabel 3.2

Penduduk Desa Turi

No	Uraian	Volume	Satuan
1	Jumlah Laki-laki	2.914	Orang
2	Jumlah Perempuan	3.065	Orang
3	Jumlah Kartu Keluarga	1.056	KK
4	Kepadatan Penduduk	485	Per KM

Sumber : Data statistik Desa Turi 2019

6. Kondisi Sosial Budaya

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan satu hal yang penting dalam mendukung kemajuan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan memiliki pengaruh dalam jangka panjang khususnya pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada selanjutnya akan mendorong pula pada tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan angka pengangguran dan kemiskinan. Presentase tingkat pendidikan di Desa Turi rata-rata berpendidikan SD atau sederajat sampai SMP atau SMA sederajat.

Daftar Pendidikan Penduduk Desa Turi

No	Tingkat Pendidikan	Volume	Satuan
1	Tidak Punya Ijazah	112	Orang
2	SD/ sederajat	697	Orang
3	SMP/ sederajat	521	Orang
4	SMA/ sederajat	215	Orang
5	Perguruan Tinggi	20	Orang

[illegible]

Pada umumnya suatu pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat itu berbeda-beda karena adanya perbedaan mengenai keahlian, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat serta adanya perbedaan keadaan geografis suatu wilayah. Pembangunan ekonomi yang baik ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan melalui kualitas angkatan kerja dan mata pencaharian yang ada di desa tersebut. Menurut data yang didapatkan dari pemerintah desa, bahwa tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Turi Rp. 700.000. secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Turi dapat teridentifikasi ke dalam berbagai sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan dan industri.

Daftar Lapangan Usaha Desa Turi¹⁸

No.	Lapangan Usaha	Volume	Satuan
1	Petani	1.022	Orang
2	Buruh Tani	1.464	Orang
3	Perdagangan	758	Orang

[illegible]

Sumber : Data statistik Desa Turi 2019

1. Data Penerimaan Alokasi Dana Desa

Berhubungan dengan pemanfaatan dan pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa tersebut yang dilaksanakan dengan benar-benar secara efisien dan efektif sehingga memberikan dampak tersendiri untuk warga antara lain, perekonomian di desa semakin produktif, mengurangi

Pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa kepada pemerintahan desa, besar harapan pemerintah pusat agar aparat desa dapat memanfaatkan anggaran tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanpa melakukan penyelewengan dana. Terkait dengan hal tersebut, berikut pendapatan yang diterima oleh Desa Turi pada tahun 2019 antara lain Pendapatan Asli Desa sebesar Rp. 582.300.000,00, Dana Desa sebesar Rp. 1.022.530.000,00 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 618.384.781 jadi jumlah keuangan desa yang diterima oleh Desa Turi sebesar Rp. 2.223.214.781,00 dan diaplikasikan untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

2. Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

[illegible]

perencanaan menjadi salah satu indikator dalam mencapai keberhasilan dalam suatu kegiatan.

Berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur perencanaan pembangunan desa dengan menyeimbangkan pada perencanaan keuangan desa. Adapun hal yang harus dilakukan dua perencanaan tersebut menjadi seimbang yaitu benar-benar memanfaatkan anggaran Alokasi Dana Desa tersebut dengan sebaik mungkin guna menghasilkan pembangunan desa yang sesuai dengan rencana. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sunardi selaku bendahara Desa Turi, menuturkan “bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Turi sudah sesuai dengan yang diinginkan dimana pada awal pengalokasian dana desa sudah dibentuk tim pelaksana pada proses pengadaan musrembangdes.¹⁹

Sesuai dengan pernyataan kepala desa Turi, bapak Sunyoto pada awal mula penjangkaran aspirasi masyarakat desa pada musrembangdes tahapan awal pelaksanaan dengan masyarakat mengajukan program kepada kamituwo selanjutnya kamituwo mengajukanya pada musrembangdes selanjutnya di pilah dan dipilih dan dijadikan sebagai rencana prioritas, setelah usulan diterima usulan tersebut masuk kedalam RPJM. Dalam RPJM semua program tersebut dibedah lagi dengan mencari skala prioritas dan seanjutnya masuk kedalam Rencana Kerja Prioritas (RKP).²⁰

¹⁹ Wawancara dengan bapak Sunardi mengenai proses pengalokasian APBDes di balai Desa Turi. 24 oktober 2019

20 Wawancara dengan bapak sunyoto mengenai proses pengalokasian APBDes di balai Desa Turi.
24 oktober 2019

Dilain tempat hasil wawancara dengan Taufiqurohman selaku pendamping Desa Turi dia mengatakan bahwasanya masyarakat belum terlalu paham mengenai Alokasi Dana Desa dikarenakan kurangnya sosialisai pemerintah desa kepada masyarakat, tetapi masyarakat yang sudah mengetahui akan adanya Alokasi dana Desa tingkat partisipasinya sangat bagus dengan kehadirannya pada saat penyampaian usul program di rumah kamituwo.²²

²¹ Wawancara dengan bapak Maghfur mengenai proses pengalokasian APBDes di balai Desa Turi. 24 oktober 2019

²² Wawancara dengan bapak Taufiqurohman mengenai proses pengalokasian APBDes di Desa Turi RT 02 . 26 oktober 2019

musrembangdes. Hal ini disebabkan oleh kesibukan masyarakat sendiri dan kurang taunya mengenai musrembangdes.²³

Hasil wawancara dengan Bapak Darno selaku warga masyarakat Desa Turi yang bekerja sebagai Petani mengatakan bahwa “saya selaku warga masyarakat Desa Turi ini masih kurang faham mengenai apa itu perencanaan yang utamanya dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang katanya akan digunakan untuk pembangunan desa, ditambah lagi dengan pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar saja kalau saya pribadi dan sejumlah masyarakat lainnya tidak pernah hadir dalam kegiatan musrenbangdes.

3. Mekanisme pelaksanaan Alokasi dana Desa di Desa Turi

Pada tahap pelaksanaan ini merupakan lanjutan dari tahap perencanaan dimana sebuah rencana yang sudah disusun dengan baik dan terperinci kemudian dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan memperoleh tujuan yang diinginkan. Di dalam tahap pelaksanaan ini merupakan lanjutan dari tahap perencanaan keuangan desa yang mencakup dari penerimaan dan pengeluaran.

Telah dijabarkan mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa oleh Bapak Sunyoto selaku Kepala Desa bahwa “seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dikelola dan disimpan pada rekening kas desa. Apabila ingin mencairkan uang maka harus ada tanda tangan kepala desa dan kela urusan keuangan desa. Adapun dalam setiap pencairan dana

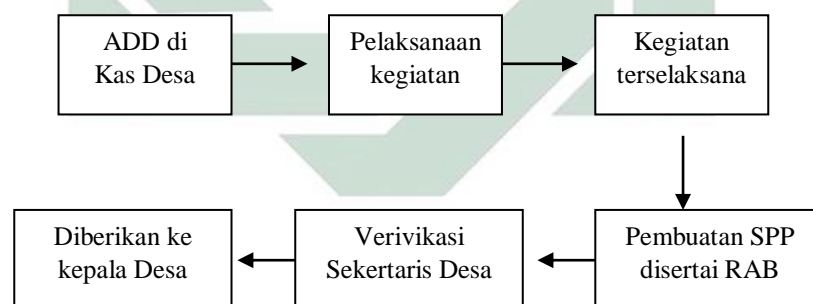
²³ Wawancara dengan bapak wahyu mengenai proses pengalokasian APBDes di Desa Turi. 26 oktober 2019

yang sudah disesuaikan dengan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang sudah terencana pada tahap perencanaan terutama pada Alokasi Dana Desanya harus membuat, mengajukan dan menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pada akhir kegiatan yang selanjutnya diserahkan ke Kepala Desa yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa.

Dalam memenuhi keseharian meliputi operasional desa kepala urusan keuangan desa dapat menyimpan uang tunai dengan ketentuan 5% dari belanja operasional. Adapun pembayaran kepada pihak tender proyek menggunakan sistem DP (Duit Pertama) dengan tujuan supaya seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Pemberian DP terlebih dahulu harus melalui verifikasi kepala desa untuk keabsahannya.

Gambar 3.3

Alur pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa Turi



Sumber : Data statistik Desa Turi 2019

Berdasarkan alur pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa Turi, setelah anggaran Alokasi Dana Desa di transferkan oleh pemerintah pusat lewat rekening kas desa kemudian dilakukan pengimplementasian pelaksanaan kegiatan dan setelah semua kegiatan terlaksana maka harus

Dalam tahap pertanggungjawaban ini Kepala Desa mempunyai kewajiban dalam menyampaikan laporan mengenai pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam menjadi sebuah pemimpin. Laporan pertanggungjawaban tersebut berisikan mengenai laporan yang menyangkut laporan kegiatan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota melalui camat dan laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan. Berikut rincian laporan yang disampaikan oleh Kepala Desa antara lain:

- 1) Laporan semesteran realisasi pelaksanaan APBDesa
- 2) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati pada tiap akhir tahun anggaran.

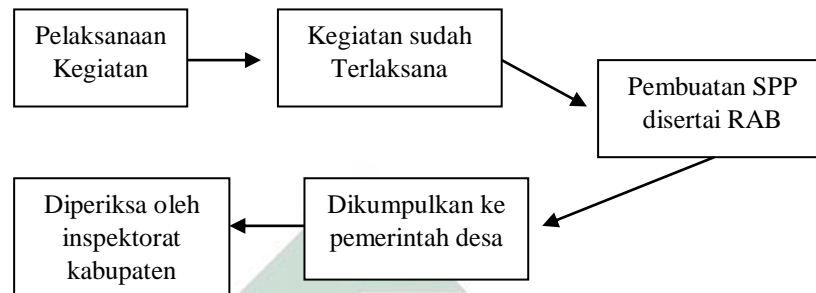
[illegible]

Begitu juga wawancara dengan ibu Puji selaku masyarakat desa Turi, sekarang ini pemerintah desa turi telah melakukan publikasi anggaran dana desa melalui banner di depan kantor desa. Tetapi dirasan kurang efisien karena luasnya desa Turi membuat masyarakat yang tidak sedang berkunjung kekantor desa bisa mengetahui. Seharusnya di tambah lagi setiap kamituwan di kasih satu papan pemberitahuan anggaran dana desa.²⁵

²⁵ Wawancara dengan ibu Puji mengenai transparansi APBDes di balai Turi. 24 oktober 2019

Gambar 3.4

Alur tahap pertanggungjawaban keuangan Desa Turi



Sumber : Data Statistik Desa Turi 2019

Berdasarkan alur dari tahap pertanggungjawaban keuangan desa Turi yang dijelaskan oleh informan, bahwa pada tahap pertanggungjawaban ini dilaksanakan ketika semua kegiatan sudah terlaksana dan selanjutnya dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) dimana semua surat SPP dan RAB selanjutnya dikumpulkan ke pemerintah desa dan diperiksa oleh inspektorat kabupaten.

C. Dampak pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

Dampak dari adanya anggaran Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan daerah yang ada di Desa Turi ini dapat diidentifikasi melalui hasil wawancara langsung dengan pemerintah Desa Turi sebagai instansi yang bertugas sebagai pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa sampai pada tahap pertanggungjawaban terutama dalam pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan daerah dan otonomi daerah di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan.

1. Analisis Penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan pada tahun 2019

Penganggaran Alokasi Dana Desa di Desa Turi merupakan suatu proses dengan urutan pengendalian, pengaturan, mengurus serta

Sesuai yang di dapat oleh peneli dari hasil wawancara dengan aparat desa dan masyarakat dapat disimpulkan bahwasanya perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan sudah sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Dimana dalam tahap awal ini diisi dengan kegiatan musrenbangdes dengan tujuan membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa dengan melihat potensi dan sumber pembangunan yang belum tersedia di desa.

[illegible]

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan didasarkan pada peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengalokasian dana desa. Anggaran Alokasi Dana Desa yang dialokasikan kedalam perberdayaan masyarakat sebesar Rp. 145.840.000 dimana anggaran tersebut digunakan dalam beberapa program-program seperti pelatihan kelompok tani, sosialisasi penggunaan dan desa, Pengembangan sistem informasi dasar, pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan (pelatihan pembuatan kue basah, sosialisai balita, pelatihanna membuat tas dari benang wol), kampanye dan promosi hidup sehat, bantuan kader kesehatan masyarakat.

[illegible]

Dalam prakteknya pelaksanaan kegiatan keuangan desa di Desa Turi ini terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam pengalokasiannya. Pelaksanaan tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Alokasi Dana Desa dalam tahap pencairannya.

Dari penjelasan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasanya dalam perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Turi dari segi administratif sudah sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dan berjalan sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat desa. Namun, dalam halnya pasrtisipasi masyarakat masih kurang karena masyarakat kurang partisipasinya dalam mengelola serta kurang

Dalam proses pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Turi secara administratif sudah sesuai dengan peraturan Kabupaten Magetan. Pada prosesnya laporan pertanggungjawaban disusun oleh Kepala Urusan Keuangan selanjutnya dikumpulkan ke Pemerintahan Desa untuk diverifikasi dan diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten untuk diperiksa serta selalu tepat waktu dalam pelaporannya.

Pada tahapan-tahapan tersebut laporan kepada masyarakat berupa SPJ harus dilakukan supaya masyarakat bisa mengetahui dari segi apa yang kurang bagaimana perkembangan kinerja pemerintah Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Proses pelaporan tanggungjawab anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Turi sudah tersampaikan kepada masyarakat melalui banner pengumuman didepan kantor desa.

[illegible]

Bupati/Walikota dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tepat waktu. Dan secara kemasyarakatan sudah tersampaikan melalui banner pengumuman di depan kantor desa, akan tetapi pengumuman tersebut dirasa kurang, karena pengumuman tersebut hanya ada satu di kantor desa. Sehingga apabila masyarakat yang tidak sedang berkunjung ke kantor desa tidak mengetahui.

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa Turi sudah baik dari segi administratif dan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dimana dalam laporan pertanggungjawaban tersebut sudah dibuat secara per periodik dan tahunan serta sudah tersampaikan surat pertanggungjawabannya kepada Bupati/Walikota dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan tepat waktu. Pada tahap publikasi dengan masyarakat juga tersampaikan dengan baik dalam bentuk tulisan yang berupa papan pengumuman mengenai rincian penerimaan dan pengeluaran anggaran Alokasi Dana Desa. Akan tetapi, keikutsertaan masyarakat masih minim karena kurang fahamnya mengenai tahapan-tahapan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa.

B. Analisi Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan

Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif dengan adanya perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka juga akan mampu meningkatkan pembangunan nasional. Penerapan Alokasi Dana Desa dapat menjadikan Pemerintah Desa lebih mandiri dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri atau kepentingan Pemerintah Desa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 bahwasanya daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus keperluan pemerintahannya sendiri dan kepentingan masyarakat yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya daerah yang disebut sebagai daerah yang merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya dan kepentingan masyarakatnya sendiri dengan berdasarkan aspirasi masyarakat dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan daerah memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pembangunan nasional. Pada pembangunan desa melibatkan masyarakat desa dalam penyaluran aspirasi kepada desa dan desa memiliki basis ekonomi, politik, sosial budaya dan perubahan keamanan. Kebijakan pemerintah pusat dalam hal peningkatan pembangunan desa salah satunya adalah pemberian anggaran Alokasi Dana Desa kepada setiap desa yang ada di Indonesia.

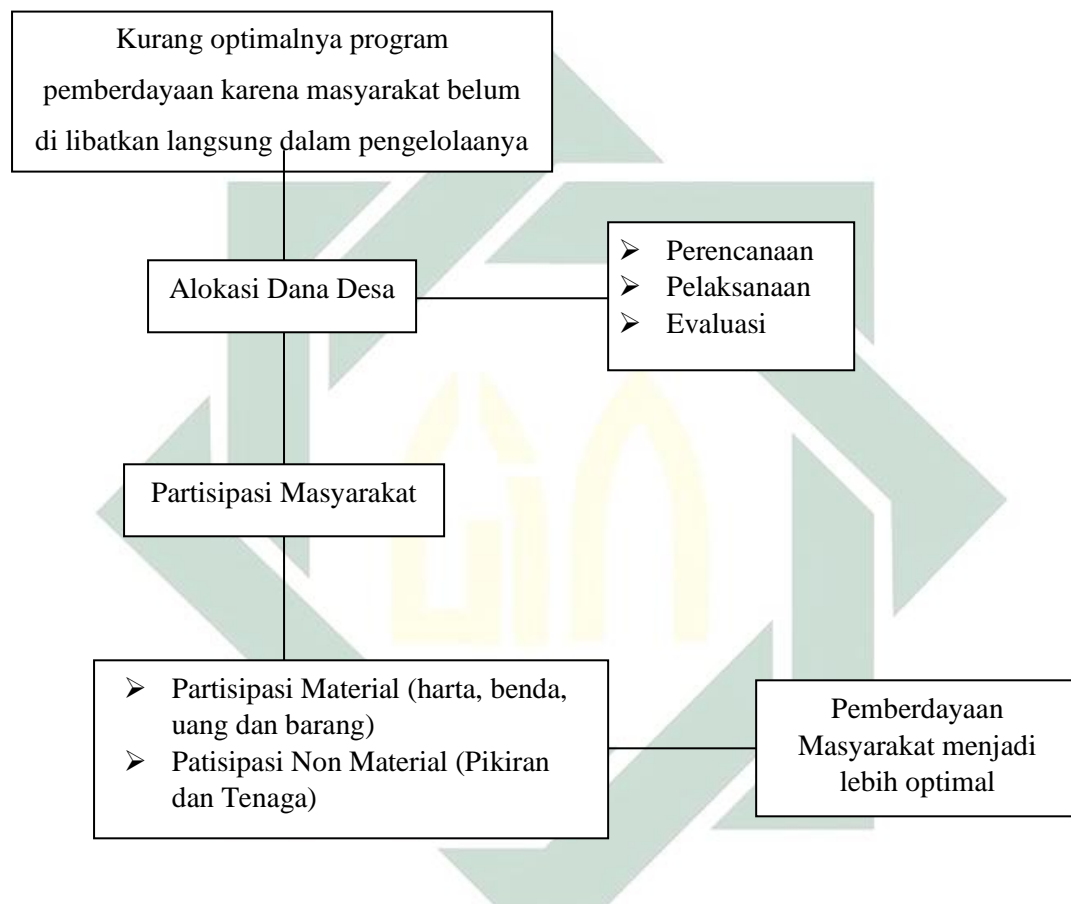
Sebelum adanya Alokasi Dana Desa pemberdayaan di desa Turi tidak berjalan karena tidak adanya program dari pemerintah daerah. Masyarakat dalam kesehariannya hanya melakukan aktifitas yang monoton seperti ibu-ibu hanya dirumah dan mengurus anak dan bapak-bapak yang hanya kesawah. Dengan adanya Anggaran Dana Desa masyarakat lebih terberdayakan dan

Keadaan Masyarakat setelah adanya pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesejahteraan antara lain adalah : Pertama, dengan diadakannya pemberdayaan masyarakat lebih mengerti dengan SDM dan potensi yang dimiliki oleh Desa Turi. Kedua, masyarakat sebagai anggota warga belajar bisa mendapatkan pengetahuan dan ketrampilandan tambahn ilmu dalam keseharian. Ketiga, dengan mengikuti pelatihan mayarakat bisa membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Sebelum dan sesudah adanya pemberdayaan

[illegible]

program-program pemberdayaan oleh perangkat desa. Selain kurangnya sosialisasi dari perangkat desa masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan menjadi tak acuh terhadap program yang dilaksanakan pemerintah desa.

Gambar 4.1**Kerangka berfikir**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- [illegible]

2. Untuk masyarakat Desa Turi Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan diharapkan mampu mengawasi program anggaran Alokasi Dana Desa dan terjun langsung dalam melaksanakan pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa serta dalam program-program yang telah direncanakan oleh pemerintahan Desa yang menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa.
3. Untuk akademis diharapkan mampu memberikan suatu hal yang baru dalam perkembangan ekonomi pada suatu Pemerintah Desa, masyarakat beserta lapisan masyarakat yang mampu menjalankan program anggaran Alokasi Dana Desa dengan jujur, baik, transparan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

